

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat (Nor Hadi, 2011: 88).

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat sumberdaya bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu "*social contract*" (Lako, 2011:5).

2.1.2 Teori Stakeholder

Bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder* (Nor Hadi, 2011:94).

Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan (Lako, 2011:5).

2.1.3 Teori Kontrak Sosial

Teori muncul akibat adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara

eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya (Nor Hadi, 2011:95).

Keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh reguasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi *cost* dan *benefit* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela (Lako,2011:6).

2.1.4 Kinerja Lingkungan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja menurut Moehariono (2012: 95) yaitu:

“Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.”

Menurut Abdullah (2014: 3) kinerja yaitu: “Hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi”.

Menurut Wirawan (2009: 5) menyebutkan bahwa:

“kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang dalam Bahasa Inggris adalah *performance*. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja erat kaitannya dengan hasil pekerjaan dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu.

2.1.4.2 Jenis-jenis Kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009: 68) ada tiga jenis kinerja yaitu:

1. **Kinerja Administratif**

Kinerja administratif berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi. Termasuk didalamnya tentang struktur administratif yang mengatur hubungan otoritas (wewenang) dan tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang terdapat dalam organisasi. Disamping itu, kinerja administratif berkaitan dengan kinerja dari mekanisme aliran informasi antar unit kerja dalam organisasi, agar tercapai sinkronisasi kerja antar unit kerja.

2. **Kinerja Operasional**

Kinerja operasional berkaitan dengan efektifitas penggunaan setiap sumber daya yang digunakan organisasi. Kemampuan mencapai efektifitas penggunaan sumber daya (modal, bahan baku, teknologi dan lain-lain) tergantung kepada sumber daya manusia yang mengerjakan.

3. **Kinerja Strategik**

Kinerja strategik biasanya berkaitan dengan strategi dalam penyesuaian terhadap lingkungannya dan kemampuan dimana suatu organisasi berada.

Biasanya kebijakan strategik di pegang oleh top manajer karena menyangkut strategi menghadapi pihak luar, dan juga kinerja strategic harus mampu membuat visi kedepan tentang kondisi makro ekonomi Negara yang berpengaruh pada kelangsungan organisasi.

2.1.4.3 Definisi Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan keseluruhan pencapaian perusahaan dalam mengelola masalah-masalah lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Ikhsan (2009: 308) bahwa:

“*Environmental Performance* atau biasa disebut dengan Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan”.

Menurut Suratno (2006) pengertian kinerja lingkungan sebagai berikut:

“*Environmental performance* adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). *Environmental performance* perusahaan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi”.

Menurut Tia Rahma. P (2013) bahwa: “Kinerja lingkungan adalah usaha perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik dengan melaksanakan aktifitas dan menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan.

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 poin 2:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

2.1.4.4 Manfaat Kinerja Lingkungan

Menurut Mardikanto (2014: 150) gagasan untuk memiliki sistem manajemen kinerja lingkungan membantu menjamin komitmen perusahaan untuk berikut:

1. Komitmen manajemen untuk memenuhi ketentuan kebijakan, tujuan dan aspirasi
2. Fokus pada penyebaran budaya pelestarian bukan mengatur pengobatan atau tindakan korektif di kemudian hari
3. Proses perbaikan terus menerus. Sebagai imbalan untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan, keuntungan ekonomi dapat direalisasikan. Keuntungan tersebut harus ditentukan untuk memiliki mereka dan nilai-nilai mereka ditunjukkan sebelumnya pihak, terutama pemangku kepentingan (pemegang saham). Hal ini akan memberikan perusahaan untuk kesempatan menghubungkan tujuan lingkungan

dengan hasil keuangan tertentu, dan sebagainya menjamin ketersediaan sumber daya.

Menurut Mardikanto (2014:150) unsur – unsur utama dari tanggung jawab lingkungan meliputi:

1. Mengadopsi kinerja lingkungan yang spesifik, aturan dan standar pengukuran.
2. Memfasilitasi lingkungan teknologi pengembangan, konversi dan alat angkut.
3. Mempromosikan kesadaran lingkungan.
4. Membuka saluran negosiasi dengan pihak terkait, dan berkomunikasi dengan pihak – pihak tersebut tentang masalah lingkungan.

2.1.4.5 Tujuan Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan menjadi hal utama dan mulai dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari perusahaan. Seluruh aktivitas operasi perusahaan berkaitan dengan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dinilai dapat memberikan dampak terhadap lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Bansal dan Roth (2000) serta Coglianse dan Nash (2001):

“National and international regulatory agencies have enforced more stringent legislation, while environmental organization and consumers have intensified the public scrutiny on the environmental conduct of the business.”

Seluruh sendi perusahaan harus memiliki kesadaran akan lingkungan termasuk para eksekutif dan *shareholders* perusahaan, dengan melakukan tindakan untuk merealisasikan kesadaran mereka terhadap pentingnya lingkungan.

Demikian halnya dengan akuntan, sebagai bagian dari perusahaan, mereka harus memiliki kesadaran atas isu lingkungan. Tindakan yang dapat dilakukan oleh para akuntan adalah dengan menerapkan perlakuan akuntansi terhadap lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungannya, perusahaan diharapkan bisa mengenali atau melakukan proses produksi berkualitas tinggi yang sesuai dengan tanggung jawab lingkungan. Perusahaan akan termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan proyek yang berhubungan dengan lingkungan dan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, jika proyek dan produk tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

Beberapa aktivitas seperti mengurangi pembuangan, meningkatkan kualitas, menghemat energi, daur ulang, dan mentaati hukum dan peraturan pengendalian polusi sangatlah diperlukan, sehingga kinerja perusahaan terhadap lingkungan diharapkan bisa meningkat dan memberikan manfaat tidak hanya untuk lingkungan tetapi juga untuk perusahaan itu sendiri dan masyarakat secara umum.

2.1.4.6 Metode Pengukuran Kinerja Lingkungan

Menurut Ikhsan (2009:306) pengukuran kinerja lingkungan didefinisikan sebagai:

“Hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi”.

Pujiasih (2015) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja lingkungan menggunakan:

“Kinerja lingkungan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan hidup. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan mendapat insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung pada tingkat ketaatannya”.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerapkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (*reuse, reduce, recycle*), efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan

PROPER. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah, hingga yang terburuk hitam untuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada.

Kriteria Penilaian PROPER yang lebih lengkap dapat di lihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat	Skor	Kriteria	Keterangan
Emas	5	Sangat Baik	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Hijau	4	Sangat Baik	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui 4R (<i>Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery</i>) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dengan baik.
Biru	3	Baik	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	2	Buruk	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
Hitam	1	Sangat Buruk	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melaukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber : Laporan PROPER No. 5 Tahun 2011

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Definisi Laba

Menurut Hery (2016:15), bahwa:

“Kenaikan dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa menurut keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik”.

Menurut Shatu (2016: 68), laba adalah:

“kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemiliknya”.

Menurut Sadono Sukirno (2010:240), laba adalah: “Selisih antara penerimaan perusahaan dari penjualan produksi dengan biaya produksi, yang jumlah hasil penjualannya melebihi semua biaya”.

Menurut Kasmir (2016: 45), laba adalah: “Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah biaya”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah kenaikan modal aktiva bersih yang didapat dari hasil selisih pendapatan dengan biaya.

2.1.5.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Kasmir (2016: 303), dalam praktiknya laba terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Laba kotor (*gross profit*)

Laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.

2. Laba bersih (*net profit*)

Laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

2.1.5.3 Karakteristik Laba

Menurut Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2012: 229), terdapat lima karakteristik yang terdapat dalam laba akuntansi, yaitu:

1. "Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh perusahaan (terutama laba yang muncul dari penjualan barang atau jasa dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk berhasil melakukan penjualan tersebut).

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periode yang mengacu pada kinerja keuangan dari perusahaan selama periode tertentu.
3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip laba dan membutuhkan definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan.
4. Laba akuntansi meminta adanya pengukuran beban-beban dari segi biaya historisnya terhadap perusahaan, yang menunjukkan kekuatan yang tinggi pada prinsip biaya.
5. Laba akuntansi meminta penghasilan yang terealisasi di periode tersebut dihubungkan dengan biaya-biaya yang relevan”.

2.1.5.4 Tujuan Pelaporan Laba

Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Menurut Suwardjono (2014: 456), informasi tentang laba perusahaan diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai:

1. “Indikator efisiensi penggunaan dan tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau investasi (*rate of return on inuested capital*).
2. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.
4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu Negara.
5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tariff dalam perusahaan public.
6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang.
7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.
8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
9. Dasar pembagian deviden”

2.1.5.5 Definisi Aktiva

Menurut Hanafi (2016: 29) adalah:

“Sumber ekonomi organisasi yang dipakai untuk menjalankan kegiatannya. Atau bisa juga didefinisikan sebagai manfaat ekonomis yang akan diterima di masa yang akan datang, atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian tertentu”.

Menurut Kasmir (2016: 39), aktiva adalah: “Harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu”.

Menurut Weygandt, Kimmel dan Kieso (2013: 48), bahwa: “*probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events*”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang.

2.1.5.6 Jenis-jenis Aktiva

Jenis-jenis aktiva menurut Kasmir (2016:39), yaitu:

1. “Aktiva lancar.
Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aktiva lancar merupakan aktiva yang paling *liquid* dari aktiva lainnya. Jika perusahaan membutuhkan uang untuk membayar sesuatu yang segera harus dibayar misalnya utang yang sudah jatuh tempo, atau pembelian suatu barang atau jasa, uang tersebut dapat diperoleh dari aktiva lancar. Komponen yang ada di aktiva lancar terdiri dari antara lain kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, sewa dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya. Penyusutan aktiva lancar ini biasanya dimulai dari aktiva yang paling lancar, artinya yang paling mudah untuk dicairkan.
2. Aktiva tetap.
Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik), seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh: hak paten, merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya.

3. Aktiva lainnya.

Aktiva lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Komponen yang ada dalam aktiva lainnya adalah seperti: bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian dan lainnya”.

2.1.5.7 Definisi Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2016: 81), profitabilitas adalah: “Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu”.

Menurut Kasmir (2016: 196), bahwa:

“Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi”.

Menurut Hery (2016: 152), profitabilitas adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laba rugi dan/atau neraca”.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

2.1.5.8 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:197-198), Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri”.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”

2.1.5.9 Jenis-jenis Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2014: 199) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

GPM menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. GPM merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka GPM akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio GPM, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan. Sebaliknya, semakin rendah GPM, semakin kurang baik operasi perusahaan.

Rumus perhitungan GPM adalah sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Return On Equity* (ROE)

ROE adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Para pemegang saham melakukan investasi untuk mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan rasio ini menunjukkan seberapa baik mereka telah melakukan hal

tersebut dari kacamata akuntansi. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Modal}}$$

3. Pendapatan per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share atau EPS*)

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan laba. Para calon pemegang saham tertarik dengan EPS yang besar, karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. EPS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak} - \text{Dividen saham preferen}}{\text{Jumlah lembar saham biasa yang beredar}}$$

4. *Return On Asset (ROA)*

Return on Assets (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA merupakan rasio yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada. ROA dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesehatan kinerja keuangan sebuah perusahaan karena ROA dapat menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan

mengendalikan biaya dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}}$$

2.1.5.10 Metode Pengukuran Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) karena dengan perhitungan ROA kita dapat mengetahui apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan aktivasnya dalam kegiatan operasional perusahaan, dengan begitu nilai ROA yang bagus tentu menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi kinerja yang baik. (Hanafi dan Halim, 2016: 81-82).

Adapun rumus ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.1.6 Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure

2.1.6.1 Definisi Disclosure

Menurut Rinny, (2010) dalam Daniel, (2013), *disclosure* adalah:

“Pengungkapan (*disclosure*) adalah mengkomunikasikan mengenai posisi dari keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung makna bahwa laporan keuangan harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai hasil

aktivitas suatu unit usaha kondisi keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan”.

Menurut Hendiksen, (1998) dalam Daniel, (2013), *disclosure* yaitu: ”Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien”.

Menurut Wolk dan Tearney, (1997) dalam Widiastuti, (2002), *disclosure* adalah:

“pengungkapan (*disclosure*) terkait dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan maupun informasi tambahan (*supplementary communications*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis manajemen tentang operasi perusahaan di masa yang mendatang, prakiraan keuangan dan operasi, serta informasi lainnya”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan (*disclosure*) adalah pengeluaran informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya. Oleh karena itu pelaporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang memadai.

2.1.6.2 Jenis-jenis *Disclosure*

Jenis pengungkapan menurut Hasudung dan Didin (2008) dalam Daniel (2013), yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*).

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep134/BL/2006 Tanggal : 7 Desember 2006. tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik mensyaratkan elemen-elemen yang seharusnya wajib diungkapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Keuangan Indonesia (IAI).

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*).

pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. meskipun semua perusahaan publik diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Salah satu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan. Aktivitas *corporate social responsibility* dapat

diinformasikan dan dikomunikasikan oleh perusahaan kepada *stakeholder* melalui sebuah pengungkapan di dalam laporan. Laporan tersebut merupakan salah satu cara untuk melihat seberapa jauh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kejujuran yang dimiliki perusahaan (Muharbiyanto, 2010 dalam Rani, 2013).

2.1.6.3 Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)*

ISO 26000 dalam Rusdianto (2013:7) mendefinisikan bahwa:

“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa”.

Menurut Suhandari M. Putri dalam Untung (2010:1) bahwa:

“*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”.

Menurut Darwin (2004) dalam Rahmawati (2012:180) bahwa:

“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum”.

Menurut Mardikanto (2014:86) menyatakan bahwa: “CSR merupakan sebuah kewajiban dari perusahaan untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* merupakan konsep serta tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap *stakeholder* serta lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri.

2.1.6.4 Sumber Dana *Corporate Social Responsibility*

Menurut Dr. Maria R Nindita Radyati (2014) Sumber dana CSR dapat berasal dari dua sumber, yaitu:

1. Laba

Jika dana CSR diambil dari laba, maka CSR hanya bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan, karena laba hanya akan dibagikan untuk kegiatan filantropi (seperti donasi, sumbangan, sponsorship, dll).

2. Dana Operasional Perusahaan

Jika CSR diambil dari dana operasional, misalnya untuk membina pemasok agar dapat menghasilkan bahan baku sesuai standar perusahaan, maka manfaat CSR dapat menciptakan dampak jangka panjang. Manfaat lainnya adalah dapat mengurangi pajak.

2.1.6.5 Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

Menurut Rahmawati (2012: 183) bahwa :

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut Gray, dkk (2001) dalam Rakiemah (2009) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah:

“Suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial”.

Pratiwi dan Djamhuri (2004) mengartikan pengungkapan sosial yaitu:

“Sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada *stakeholders* mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa laporan tahunan (*annual report*) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility disclosure* adalah suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada *stakeholders* yang pada dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan (*annual report*).

2.1.6.6 Faktor - faktor *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

Menurut Deegan dalam Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*-nya, yaitu:

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.

2.1.6.7 Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

Brodshaw dan Vogel dalam Azheri (2012:36) menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup CSR yaitu:

1. *Corporate Philantrophy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari

luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.

2. *Corporate Responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

2.1.6.8 Manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam bentuk katup pengaman sosial (social security). Dengan menjelaskan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang.

Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

1. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.

4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

Menurut Rusdianto (2013:13) bahwa :

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga *stakeholder*. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan”.

2.1.6.9 Indikator *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

Corporate Social Responsibility dihitung berdasarkan standar GRI-G4. GRI-G4 menyediakan rerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. (Sumber : www.globalreporting.org).

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda: baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu, atau pelaporan online. Jenis pendekatan pengukuran GRI-G4 melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan *sustainability reporting*. Dalam standar GRI-G4 (2013) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator. (Sumber : www.globalreporting.org). Penjelasannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
91 indikator berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti.
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan.
-Dampak ekonomi tidak langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.

-praktik pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan.
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan volume.
	EN2	Presentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN5	Intensitas energi.
	EN6	Pengurangan konsumsi energi.
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
	EN9	Sumber air yang secara signifikan di pengaruhi oleh pengambilan air.
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.

	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko penunahan.
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1).
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2).
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3).
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO).
	EN21	NO_{x0} dan SO_x dan emisi udara signifikan lainnya.

-Efluen dan limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
	EN23	Bobot total berdasarkan jenis metode dan pembungan.
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Basel 2 Lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut diimpor, di ekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN26	Identitas, ukuran dan status lindung, dan keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
-Produk dan jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori.
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas

		ketidapatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasidan pengangkutan tenaga kerja.
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
-Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasokbaru menggunakan kriteria lingkungan.
	EN33	Dampak lingkungan negative signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasikan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah.

	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
-Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
-Kesehatan dan keselamatan kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.

	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja.
-Pelatihan dan pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata setahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karir secara regular menurut gender dan kategori karyawan.
-Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya.
-Kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.

-Asesmen pemasok terkait praktik ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktik ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL Sub kategori : Hak Asasi Manusia		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi.
-Non diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
-Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan

		kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
-Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
-Pekerja paksa atau wajib kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
-Praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
-Hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia.

-Asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui pengaduan formal.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori: Masyarakat		
-Masyarakat lokal	SO1	Persentase operasi dengan melibatkan masyarakat lokal, dampak & pengembangan.
	SO2	Operasi dengan dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
-Anti korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.

-Kebijakan public	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan Negara dan penerima/penerima manfaat.
-Anti persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
-Asesmen pemasok atas dampak terhadap masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat.
	SO10	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL Sub kategori: Tanggungjawab atas produk		
-Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan

	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap kepatuhan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
-Pelabelan produk dan jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR5	Hasil survey untuk mengukur kepuasan pelanggan.
-Komunikasi pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau yang disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor menurut jenis hasil.

-Privasi pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber: www.globalreporting.org

Item-item pengungkapan *corporate social responsibility* tersebut diukur

dengan menggunakan CSR Index, yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan rumus sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSRI_j$: *Corporate Social Responsibility Index* Perusahaan j

n_j : jumlah *item* untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$

$\sum X_{ij}$: jumlah *item* pengungkapan CSR yang terpenuhi

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap CSR *Disclosure*

Kartini (2013:56) menyatakan bahwa perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan akan melakukan pengungkapan informasi sebagai bentuk komunikasi dan bentuk pertanggungjawaban guna memperoleh, mempertahankan dan atau meningkatkan legitimasi dari stakeholder sehingga perusahaan dapat bertahan hidup. Dengan kata lain semakin baik kinerja lingkungan perusahaan maka akan semakin tinggi nilai *corporate social responsibility disclosure* nya.

Menurut Verrecchia (1983) dalam Rakiemah (2009) dengan *discretionary disclosure* teorinya mengatakan pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan *performance* mereka berarti menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan *environmental performance* yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan dengan *environmental performance* lebih buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh Rakiemah (2009), Permana dan Raharja (2012), Silviana dan Syarif (2015), virgiawan (2012), kusuma dkk (2014), Fitria (2014), Reni dkk (2012) menemukan hubungan yang positif signifikan secara statistik antara Kinerja Lingkungan dengan pengungkapan lingkungan (CSR *disclosure*).

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap CSR Disclosure

Profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Hal ini berarti pertumbuhan tingkat profitabilitas yang semakin tinggi dan berkesinambungan mendorong perusahaan untuk semakin luas mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang baik (Heinze, 1976 dalam Permana dan Raharja, 2012).

Donovan dan Gibson (2000) dalam Rusdianto (2013:45) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.

Beberapa hasil kajian termasuk oleh ekonom terkemuka Michael Porter (*The Competitive Advanteg of Corporate Philantropy*) menunjukkan adanya korelasi positif antara profit dan CSR, atau tujuan finansial dan tujuan sosial perusahaan. Perusahaan yang mencatat laba tertinggi adalah para pionir dalam CSR (Untung,2010:29).

Penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Raharja (2010), Anugerah, dkk. (2010), Silviana dan Syarif (2015), Virgiawan (2012), Rizkia (2012), Meita

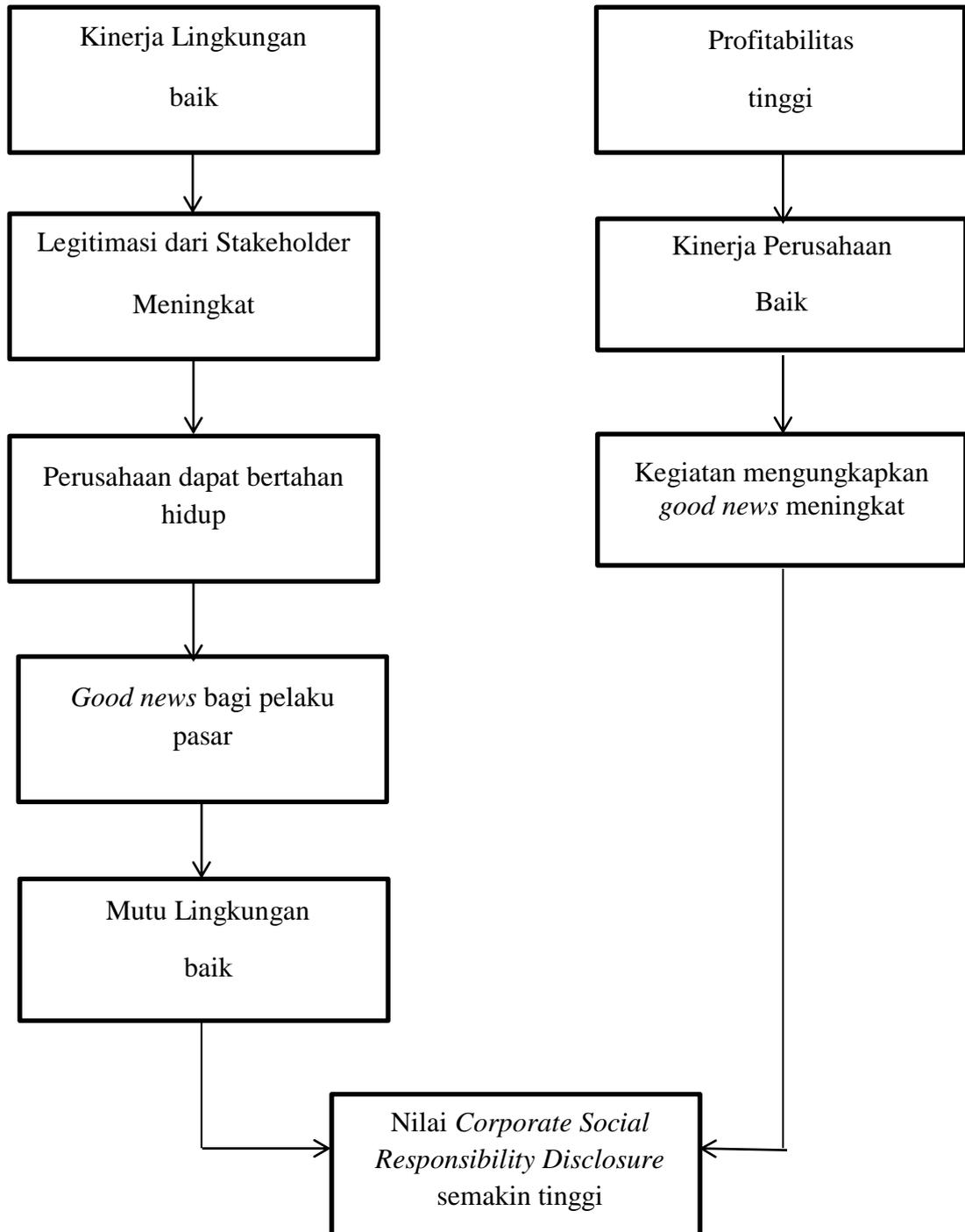
(2015) menemukan hubungan yang positif signifikan antara Profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*
- H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Kerangka pemikiran yang diajukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran